

Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baji Mangngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Rahmayanti

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: ummarahyanti@gmail.com

Abstract

The community empowerment programs implemented in Baji Mangngai Village include increasing food crop production through the provision of fertilizers and agricultural processing support, enhancing livestock production through the distribution of livestock breeding stock along with livestock housing facilities, and providing appropriate technology training for agricultural and livestock activities. However, several factors influence the utilization of village funds for community empowerment in Baji Mangngai Village. Supporting factors include government support through proactive policies, training programs, adequate infrastructure, and active community participation. Meanwhile, the inhibiting factors consist of delays in village fund disbursement, limited community involvement in the Village Development Planning Meetings (Musrenbang), fluctuations in fertilizer supply and livestock quality, as well as inadequate initial knowledge, monitoring, and evaluation of program activities. Overall, the utilization of village funds for community empowerment in Baji Mangngai Village has made a positive contribution to village development and the improvement of community welfare. Through continuous evaluation and improvements in program management and implementation, Baji Mangngai Village can continue progressing toward sustainable and inclusive community empowerment.

Keywords: Village Funds; Community Empowerment; Rural Development; Community Welfare; Baji Mangngai Village

Abstrak

Program pemberdayaan di desa baji mangngai ini berupa peningkatan produksi tanaman pangan berupa pemberian pupuk dan pengolahan pertanian dan peningkatan produksi peternakan berupa pemberian bibit ternak beserta kandangnya, serta pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan. Namun, beberapa faktor mempengaruhi pemanfaatan dana desa Baji Mangngai dalam pemberdayaan masyarakat nya, yakni faktor pendukung yakni adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan proaktif dan program pelatihan serta infrastruktur yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat. kemudian, faktor penghambatnya yakni keterlambatan dalam pencairan dana desa, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang, fluktuasi pasokan pupuk serta kualitas ternak, serta kurangnya pengetahuan awal, monitoring, dan evaluasi kegiatan. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Baji Mangngai Secara keseluruhan, pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Baji Mangngai telah memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan evaluasi terus-menerus dan peningkatan dalam pengelolaan serta implementasi program, Desa Baji Mangngai dapat terus maju menuju pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Desa Baji Mangngai

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kualitas hidup

dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa menjadi salah satu instrumen fiskal yang memberi ruang lebih besar kepada desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

sesuai kebutuhan lokal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dapat berkontribusi terhadap pembangunan perdesaan, pertumbuhan ekonomi lokal, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pengurangan kemiskinan apabila dikelola secara tepat, partisipatif, dan akuntabel (Permatasari et al., 2021; Hartojo et al., 2022; Saragi et al., 2021).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses peningkatan kapasitas, akses, dan kemampuan masyarakat agar lebih mandiri dalam menentukan serta mengelola kepentingannya. Dalam konteks Dana Desa, pemberdayaan tidak cukup dimaknai sebagai penyaluran bantuan, tetapi perlu diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat, peningkatan partisipasi, dan keberlanjutan manfaat program. Pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada pemberdayaan membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah desa sekaligus keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat (Hermawan, 2019; Firmansyah et al., 2023).

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, Melihat dari jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Baji Mangngai Tahun 2021 dengan total masyarakat miskin di Desa Baji Mangngai mencapai 700 KK dari total keseluruhan masyarakat di Desa Baji Mangngai yakni berjumlah 991 KK, hal ini menunjukkan bahwa tingkat masyarakat miskin dari tahun ke tahun cukup tinggi, maka dari itu cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa.

Hal ini terbukti dengan hasil temuan dilapangan masyarakat menganggap kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa sebagai kegiatan formalitas. Anggapan ini terjadi karena penentuan program dan kegiatan yang dilakukan lebih didominasi oleh perangkat desa sedangkan masyarakat hanya sebagai penonton yang pasif dalam penentuan kegiatan.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Keterlibatan masyarakat diperlukan sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Penelitian mengenai Program Dana Desa menunjukkan bahwa kapasitas dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan efektivitas partisipasi, sehingga partisipasi tidak seharusnya berhenti pada kehadiran formal dalam forum perencanaan (Hendrianto, 2019).

Perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini seharusnya menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan desa. Dalam pengelolaan Dana Desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting agar keputusan anggaran memiliki legitimasi dan benar-benar menjawab kebutuhan warga (Dwimawanti et al., 2019; Sugiharti & Hariani, 2021).

Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih dapat bersifat formal apabila usulan masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai dalam penetapan program. Evaluasi pemanfaatan Dana Desa di sejumlah daerah juga menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, keterbukaan informasi, dan kapasitas aparatur agar pemanfaatan anggaran lebih tepat sasaran (Adhayanto et al., 2019; Bawono et al., 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu aspek penting dalam menilai pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Baji Mangngai.

Sehubungan dengan uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Pemanfaatan Dana Desa tahun 2022 khususnya bidang pemberdayaan masyarakat

desa untuk melihat bagaimana realisasi program pemberdayaan dengan partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam perencanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Baji Mangngai. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa dan masyarakat penerima manfaat, serta data sekunder berupa dokumen yang relevan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program. Data dianalisis melalui pengorganisasian informasi, pengelompokan temuan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dengan tetap memperhatikan konsistensi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melaksanakan program, pemerintah desa melakukan perencanaan melalui rapat internal yang dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rapat internal menghasilkan daftar prioritas usulan, rencana kerja, dan pembagian tugas yang selanjutnya dibahas bersama masyarakat dan pemangku kepentingan. Tahap perencanaan menjadi penting karena kualitas sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan kompetensi perangkat desa berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Sawitri & Gayatri, 2021).

Akan tetapi, Kepala Desa Baji Mangngai mengatakan “bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kali ini masih belum optimal. Salah satu masalah utama yang

dihadapi adalah masyarakat mungkin tidak cukup memahami tujuan dan pentingnya rapat atau Musrenbang ini. Padahal Musrenbang adalah forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait pembangunan desa. Namun, sepertinya informasi mengenai tujuan dan manfaat Musrenbang belum tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, hanya para kader desa dan ketua RT yang aktif hadir dalam rapat ini, sementara masyarakat awam, yang sebenarnya sangat penting untuk memberikan masukan, justru banyak yang tidak hadir.”

Kasi Pemerintahan Desa Baji Mangngai mengatakan bahwa “di desa Desa Baji Mangngai mata pencaharian masyarakatnya dominan ke bidang pertanian dan peternakan sehingga usulan usulan program yang ditawarkan berasal dari para RT dan kepala dusun berfokus pada bidang pertanian dan peternakan”. Adapun program pemberdayaan yang telah direalisasikan yakni:

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian

Kegiatan ini berupa pemberian pupuk yang terdiri dari 3 jenis yakni; pupuk urea yaitu pupuk kimia dengan kandungan nitrogen tinggi, ideal untuk pertumbuhan vegetatif, namun perlu digunakan dengan hati-hati untuk menghindari pencemaran, pupuk npk phonska yakni Pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur, memberikan nutrisi seimbang untuk berbagai fase pertumbuhan tanaman., dan pupuk eco farming merupakan Pupuk organik yang ramah lingkungan, meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman secara berkelanjutan. Pupuk tersebut dibagikan kepada kelompok tani yang berada di Desa Baji Mangngai, yang kemudian diberikan kepada masing-masing 1 orang dari tiap kelompok tani tersebut sebanyak 3 sak pupuk dari tiap jenis pupuk yang ada.

Peningkatan produksi pertanian dari pemerintah desa telah meningkatkan produksi pangan dengan bertambahnya jumlah pupuk yang digunakan membuat pemupukan tanaman lebih maksimal. Selain itu, bantuan ini juga mencakup diversifikasi jenis pupuk tidak hanya satu macam seperti sebelumnya. Dengan pemupukan yang lebih maksimal dan bervariasi, hasil produksi pertanian meningkat signifikan, memungkinkan tanaman mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap dan optimal, sehingga berdampak positif pada peningkatan hasil panen.

Meskipun program ini meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani secara langsung, terdapat kekhawatiran bahwa ketergantungan petani pada bantuan pemerintah, seperti pupuk gratis, dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kemandirian petani. Namun, melihat tindak lanjut pemerintah desa baji mangngai yang telah melakukan evaluasi terhadap programnya, mereka kemudian mengadakan program pelatihan yang berkelanjutan yang dapat membantu petani meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen tanah, pemupukan organik, dan teknik pertanian yang ramah lingkungan, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan mengembangkan sistem pertanian yang lebih mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan input produksi perlu diikuti penguatan kapasitas agar program tidak menciptakan ketergantungan. Pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan menuntut kombinasi dukungan sumber daya, peningkatan pengetahuan, dan kemampuan masyarakat untuk mengelola kegiatan secara mandiri (Muazansyah & Sudirman, 2022).

Peningkatan produksi peternakan (alat produksi / pengelolaan / kandang)

Program ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu penyediaan alat produksi, pengelolaan peternakan yang lebih baik, dan pembangunan serta perbaikan kandang. Pemerintah desa membentuk tim pelaksana program yang terdiri dari petugas desa, ahli pertanian, dan tokoh masyarakat setempat. Tim ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Selama pelaksanaan program, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan dan efektivitas program. Ini melibatkan pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data lapangan, dan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Pengelolaan program seperti ini membutuhkan kejelasan tanggung jawab, pengawasan, dan evaluasi karena akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berhubungan dengan kualitas kinerja pemerintah desa (Oktari et al., 2022).

Namun, keberhasilan program peningkatan produksi peternakan ini hanya berlangsung pada tahun 2022 saja, keberlanjutan program terhenti ditahun berikutnya karena seluruh ternak yang dikelola telah mengalami kegagalan dimana ternak-ternak terjangkit penyakit pencernaan sehingga semua ternak habis tak tersisa sementara pemerintah desa tidak melakukan tindak lanjut ditahun 2023 untuk melanjutkan produksi ternak kambing tersebut. Kegagalan keberlanjutan program ternak memperlihatkan pentingnya identifikasi risiko, pendampingan teknis, dan evaluasi setelah bantuan disalurkan. Pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada hasil tidak hanya menilai realisasi anggaran, tetapi juga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat (Aliman & Angi, 2020).

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan

Program pelatihan teknologi tepat guna didasarkan pada kebutuhan memperbarui

metode tradisional dengan teknologi yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan hasil dan kesejahteraan petani serta peternak. Penguatan keterampilan merupakan bagian penting dari pemberdayaan karena adopsi teknologi membutuhkan pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan penerima manfaat untuk menerapkannya dalam kegiatan produksi (Basalamah et al., 2023).

Kegiatan tersebut diikuti oleh kelompok tani setempat, dengan di dampingi oleh koordinator penyuluh pertanian dan koordinator penyuluh peternakan Kabupaten Maros. Materi yang disiapkan dalam kegiatan terdiri dari pengenalan tentang usia yang baik untuk menabur bibit unggul, sistem tanam legowo yakni pola bertanam yang berselang-seling antara dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong, mekanisme pemupukan dan cara pengendalian hama penyakit pada tanaman hortikultura serta pelatihan ternak berupa cara memelihara kambing dan sapi yang benar agar terhindar dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) sekaligus pemberian disinfektan di area kandang ternak sapi dan kambing masyarakat baji mangngai.

Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada para petani dan peternak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi modern dalam kegiatan sehari-hari mereka. seperti traktor, mesin pompa air dan mengajarkan teknik pembuatan kompos dan pupuk organik. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan survei dan konsultasi dengan petani dan peternak. Selanjutnya, bekerja sama dengan ahli pertanian dan peternakan untuk menyusun modul pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan metode praktis dan partisipatif sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Pelatihan teknologi tepat guna yang

disertai praktik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, tetapi efektivitasnya memerlukan dukungan lanjutan agar teknologi benar-benar diterapkan di lapangan (Siswanto et al., 2024).

Namun, Kegiatan pelatihan yang dilakukan hanya bersifat satu kali pada tahun 2022 saja dan tahun berikutnya pun tidak ada kelanjutan, sehingga tidak memberikan efek jangka panjang yang signifikan. Langkah selanjutnya adalah memastikan adanya program pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan berkesinambungan untuk petani dan peternak dalam menerapkan teknologi-teknologi baru yang mereka pelajari. Dengan demikian, pelatihan satu kali belum memadai untuk menghasilkan perubahan jangka panjang. Pendampingan, penguatan kapasitas, dan evaluasi berkelanjutan perlu ditempatkan sebagai satu rangkaian program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat pemerintah di Desa Baji Mangngai dipengaruhi beberapa faktor yakni faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor Pendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Baji Mangai yakni:

Dukungan pemerintah melalui kebijakan proaktif dan program pelatihan.

Kebijakan proaktif ini berupa penyediaan subsidi pupuk dan distribusi bibit unggul untuk petani dan peternak guna meningkatkan hasil pertanian dan peternakan. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak. Secara keseluruhan, dukungan pemerintah melalui kebijakan proaktif dan program pelatihan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian di Desa Baji Mangngai. Dukungan ini tidak hanya membantu petani meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keberlanjutan pertanian di desa tersebut.

Dukungan pemerintah desa melalui kebijakan, pelatihan, dan fasilitasi merupakan faktor penting dalam membangun kemandirian masyarakat, terutama apabila prioritas program disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal (Aprilliansyah et al., 2024).

Infrastruktur yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah juga menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan untuk transportasi dan akses ke pasar untuk membeli kebutuhan pertanian dan peternakan lainnya. Hal ini memastikan distribusi pupuk ke petani dan ternak ke peternak berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Serta adanya instruktur dan penyuluh yang berpengalaman, serta fasilitas pelatihan yang memadai dan kemudahan akses transportasi bagi peserta juga membantu memastikan bahwa pelatihan dapat diikuti oleh banyak masyarakat, sehingga manfaatnya dirasakan secara luas. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap kesuksesan program. Infrastruktur dan partisipasi masyarakat juga berhubungan dengan efektivitas pemanfaatan Dana Desa karena pembangunan fisik dan pemberdayaan perlu saling mendukung untuk memperkuat ekonomi perdesaan (Rizaldi et al., 2024).

Sama hal dengan faktor pendukung diatas, faktor penghambat menjadi salah satu yang mempengaruhi pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Keterlambatan dalam pencairan dana desa

Akibat dari keterlambatan pencairan dana desa adalah tertundanya berbagai proyek dan program yang telah direncanakan Selain itu, program pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada dana tersebut, seperti pelatihan, bantuan bibit, dan distribusi pupuk, juga mengalami penundaan. Keterlambatan pencairan berpotensi mengganggu jadwal pelaksanaan dan mengurangi efektivitas

program. Karena itu, tata kelola Dana Desa perlu didukung perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian yang konsisten (Allo & Palalangan, 2021).

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang

Partisipasi masyarakat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Desa Baji Mangngai masih kurang aktif. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Baji Mangngai yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kali ini belum optimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan pentingnya Musrenbang. Kondisi tersebut menegaskan bahwa partisipasi tidak cukup diukur dari tersedianya forum, tetapi juga dari akses informasi, kapasitas warga, dan kesempatan masyarakat untuk memengaruhi keputusan. Partisipasi masyarakat juga berkontribusi pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Sahrul et al., 2021).

Fluktuasi pasokan pupuk serta kualitas ternak.

Fluktuasi pasokan pupuk merupakan tantangan signifikan dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Ketidakpastian dalam ketersediaan pupuk, terutama di daerah terpencil, dapat mengakibatkan keterlambatan aplikasi pupuk pada tanaman. Hal ini berdampak pada pertumbuhan tanaman yang tidak optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil panen. Selain itu, kualitas ternak yang tidak konsisten atau rendah juga menjadi hambatan besar dalam program peningkatan produksi peternakan. Ternak yang tidak berkualitas sering kali tidak memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga produktivitasnya menurun. Dalam konteks pemberdayaan, risiko teknis seperti ketersediaan input dan kesehatan ternak perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar penggunaan Dana

Desa tidak berhenti pada penyerahan bantuan, tetapi menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Kurangnya pengetahuan awal, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Kurangnya pengetahuan awal di kalangan petani dan peternak tentang teknologi baru dan praktik terbaik dalam pertanian dan peternakan menghambat penerapan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Tanpa pemahaman yang memadai, petani dan peternak cenderung tidak mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan teknologi yang diperkenalkan kepada mereka. Keterbatasan pengetahuan penerima manfaat menunjukkan perlunya desain program yang tidak hanya menyediakan sarana produksi, tetapi juga membangun kompetensi masyarakat. Implementasi kebijakan Dana Desa yang berkelanjutan membutuhkan kejelasan informasi, dukungan pelaksana, dan keterlibatan masyarakat (Afifah & Rodiyah, 2024).

Selain itu, kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas program yang dijalankan. Monitoring yang tidak memadai berarti bahwa masalah-masalah yang muncul di lapangan sering kali tidak teridentifikasi dan tidak ditangani dengan cepat. Evaluasi yang lemah juga mengakibatkan kurangnya umpan balik untuk perbaikan program di masa depan, sehingga program yang tidak efektif mungkin terus berlanjut tanpa adanya penyesuaian yang diperlukan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan Dana Desa dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan (Santoso et al., 2022). Monitoring yang kuat juga penting karena struktur belanja Dana Desa dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap pengurangan kemiskinan perdesaan (Agusta & Khoirunurrofik, 2024).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa tahun 2022 di Desa Baji Mangngai berupa: (a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui bantuan pemberian beberapa jenis pupuk ke para petani yang memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan kesejahteraan petani. (b) Peningkatan produksi peternakan melalui pembangunan kandang dan pemberian bibit ternak kambing. Akan tetapi program ini belum optimal dalam memberdayakan masyarakat dan belum memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang karena ditahun berikutnya ternak yang telah diberikan habis tak tersisa akibat terserang penyakit. (c) Pelatihan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan program ini berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapan petani dan peternak dalam menghadapi tantangan dalam usaha pertanian dan peternakan mereka dan terbilang menjadi salah satu tingkat keberhasilan program ini.

Pemanfaatan dana desa Baji Mangngai dalam pemberdayaan masyarakat nya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan proaktif dan program pelatihan serta infrastruktur yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat, keterlambatan dalam pencairan dana desa, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang, fluktuasi pasokan pupuk serta kualitas ternak, serta kurangnya pengetahuan awal, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Baji Mangngai telah memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan evaluasi terus-menerus dan peningkatan dalam pengelolaan serta implementasi program, Desa Baji Mangngai

dapat terus maju menuju pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif. Temuan ini sejalan dengan bukti yang menunjukkan bahwa Dana Desa dapat mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan dan pengurangan kemiskinan, tetapi dampaknya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, kapasitas kelembagaan, serta ketepatan struktur belanja (Anam et al., 2023; Agusta & Khoirunurrofik, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Hartojo, N., Ikhsan, M., Dartanto, T., & Sumarto, S. (2022). A growing light in the lagging region in Indonesia: The impact of Village Fund on rural economic growth. *Economies*, 10(9), 217. <https://doi.org/10.3390/economies10090217>
- Saragi, N. B., Muluk, M. R. K., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Indonesia's Village Fund Program: Does it contribute to poverty reduction? *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.21787/jpb.13.2021.65-80>
- Hermawan, E. (2019). Community empowerment through management of Village Funds allocation in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 67–79. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i3.30>
- Firmansyah, Hendra, Muhammadon, & Budiman, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1683–1690. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.5002>
- Hendrianto, W. (2019). Improving the effectiveness of community participation in Village Fund Program. *Bappenas Working Papers*, 2(2), 215–222. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.41>
- Dwimawanti, I. H., Rahman, A. Z., & Rahman, R. F. (2019). Managerial accountability in Village Fund management. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 109–125. <https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.109-125>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The evaluation of the utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, 11, 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors affecting accountability of Village Fund management through implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3), 471–491. <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Sawitri, P. I., & Gayatri. (2021). Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2). <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p17>
- Muazansyah, I., & Sudirman, I. (2022). Effectiveness of Village Fund management and community empowerment assistance in Bulungan District. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 101–109. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.633>

- Oktari, V., Zarefar, A., Afifah, U., & Khoiriyah, M. (2022). Village Fund management accountability and its implications on village government performance. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(2). <https://doi.org/10.33603/jka.v6i2.7236>
- Aliman, L. P., & Angi, Y. F. (2020). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 28–37. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2364>
- Basalamah, A., Syam, H., & Mappalotteng, A. M. (2023). Analysis of entrepreneurial aspects of appropriate technology training models to create farmer business opportunities. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 49(3), 318–327. <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v49i31158>
- Siswanto, A., Haji, W. H., Suryadi, D., Hady, S., et al. (2024). Training on the use of appropriate technology to increase agricultural production in villages in Indonesia. *Unram Journal of Community Service*, 5(3), 149–154. <https://doi.org/10.29303/ujcs.v5i3.673>
- Aprilliansyah, D., Purwanto, D., & Parahita, B. N. (2024). Village Fund management in community empowerment: Study in Bendan Village, Banyudono Subdistrict, Boyolali Regency. *Gema Wiralodra*, 15(1), 282–294. <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.623>
- Rizaldi, M., Suman, A., & Ekawaty, M. (2024). From budget to prosperity: Analyzing the Village Fund's contribution to rural advancement in Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 12(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2024.012.02.2>
- Allo, Y. T., & Palalangan, C. A. (2021). Disclosing accountability and transparency of Village Fund management. *Proceedings of ICONESBS 2020*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2304616>
- Sahrul, V. S., Atichasari, A. S., & Ristiyana, R. (2021). Peningkatan accountability for Village Fund management melalui penerapan internal control system, village government competence dan society participation. *Ekonomi Bisnis*, 27(1), 560–573. <https://doi.org/10.33592/jeb.v27i1.1226>
- Afifah, I. N., & Rodiyah, I. (2024). Optimizing rural development: Strategic implementation of the Village Fund policy for sustainable community empowerment. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1343>
- Santoso, L., Suprihati, & Ningsih, S. (2022). The effect of village apparatus competence, internal control system, and organizational commitments on Village Fund management accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6236>
- Agusta, F. A., & Khoirunurrofik. (2024). Does expenditure structure affect rural poverty alleviation in Indonesia? The role of Village Fund management. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i1.524>
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1, 14. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>